

|                                                                                   |                                                                                                               |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>News Title :</b> Aspakrindo: Audit Gabungan PPAK dan Bappebti Bikin Industri Kripto dan NFT Makin Sehat    |                                 |
|                                                                                   | <b>Media Name :</b> investor.id                                                                               | <b>Journalist :</b> Lona Olavia |
|                                                                                   | <b>Publish Date :</b> 04 February 2022                                                                        | <b>Tonality :</b> Positive      |
|                                                                                   | <b>News Page :</b>                                                                                            | <b>News Value :</b> 0           |
|                                                                                   | <b>Resources :</b> Teguh Kurniawan Harmanda (Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo)) | <b>Ads Value :</b> 0            |
|                                                                                   | <b>Section/Rubrication :</b> Market and Corporate                                                             | <b>Topic :</b> kripto           |



COO Tokocrypto/Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo), Teguh Harmanda.

### Aspakrindo: Audit Gabungan PPAK dan Bappebti Bikin Industri Kripto dan NFT Makin Sehat

Jumat, 4 Februari 2022 | 18:16 WIB  
Lona Olavia

JAKARTA, investor.id - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) akan melakukan audit bersama untuk mengawasi transaksi aset kripto dan *non-fungible token* (NFT). Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam Rapat Kerja Bersama Komisi III DPR, baru-baru ini.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) & COO Tokocrypto Teguh Kurniawan Harmanda, menyambut baik upaya yang dilakukan oleh PPATK dan Bappebti. Langkah tersebut akan membuat industri aset kripto dan NFT menjadi *legitimate* dan semakin sehat.

**Baca juga:** [Bingung Mau Pilih Aset Kripto yang Mana? Ini Tipsnya](#).

"Pelaksanaan *joint* audit antara PPATK dan Bappebti akan membuat industri aset kripto dan NFT menjadi lebih sehat. Langkah ini bisa melindungi investor, pedagang dan lembaga terkait lainnya. Masyarakat juga bisa lebih *confidence* untuk masuk ke industri, karena sudah ada kejelasan transaksi yang dapat mencegah penyalahgunaan praktik pencucian uang," kata pria yang akrab disapa Manda, Jumat (4/2).

Seperti diketahui, perdagangan aset kripto di Indonesia diperbolehkan dan diawasi oleh Bappebti di bawah Kementerian Perdagangan sejak 2019. Sementara, Bappebti akan menyusun kebijakan yang tepat untuk mengatur transaksi NFT di Indonesia. Namun, menunggu ekosistem bursa kripto terbentuk yang diperkirakan selesai pada kuartal I 2021.

Soal penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pengembangan senjata pemusnah massal, sudah diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program APU-PPT Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

"Adanya kewajiban penerapan program APU PPT oleh para pedagang aset kripto sesuai dengan yang diatur dalam PerBa, seperti kewajiban Proses Uji Tuntas Pelanggan (*Customer Due Diligence Process*), kewajiban pemantauan transaksi, adanya kewajiban pelaporan setiap transaksi Aset Kripto yang mencurigakan kepada PPATK dan Bappebti, dan peran serta direksi dalam penerapan APU PPT," kata Manda.

Pedagang aset kripto juga harus menjalankan regulasi AML (*Anti Money Laundering*) yang mewajibkan melakukan prosedur KYC (*Know your Customer*), yang artinya saat ingin membuat akun diharuskan mengunggah KTP sebagai identitas. Setelah lulus proses identifikasi dan verifikasi sesuai ketentuan APU dan PPT, pelanggan dapat diberikan akun untuk transaksi perdagangan aset kripto.

**Baca juga:** [Kepercayaan Diri Investor Kripto Perlahan Mulai Pulih](#)

Peraturan tersebut memberi ruang pengembangan usaha inovasi komoditas digital, kepastian berusaha di sektor digital, serta memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, termasuk dana nasabah atau pengguna aset kripto.

"Sebuah teknologi baru apa pun bisa dipakai untuk kejahatan maupun kebaikan, tergantung penggunaannya. Namun, balik lagi aset kripto dan NFT dibangun di atas teknologi blockchain yang dapat meningkatkan transparansi, sekaligus mengurangi peluang korupsi," pungkas Manda.

Editor : **Lona Olavia** (olavia.lona@gmail.com)